

SKRIPSI

TINGKAT PEMANFAATAN FASILITAS POKOK DAN FUNGSIONAL UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) LANTORA KAB. POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANDI RAHMAT ASHARI

L051 17 1510



**PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
DEPARTEMEN PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

**TINGKAT PEMANFAATAN FASILITAS POKOK DAN
FUNGSIONAL UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI DI
PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) LANTORA
KAB. POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

ANDI RAHMAT ASHARI

L051 17 1510

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan



**PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
DEPARTEMEN PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINGKAT PEMANFAATAN FASILITAS POKOK DAN
FUNGSIONAL UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI DI
PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) LANTORA
KAB. POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANDI RAHMAT ASHARI

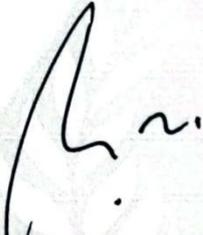
L051 17 1510

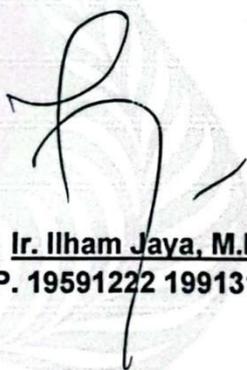
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin pada tanggal 1 Februari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui

Pembimbing Utama,

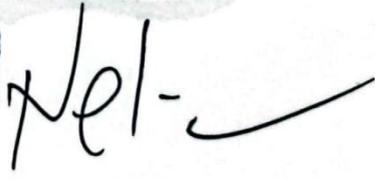
Pembimbing Anggota,


Dr. Ir. St. Aisjah Farhum, M.Si
NIP. 19690605 1993032 002


Ir. Ilham Jaya, M.M
NIP. 19591222 199131 001

**Ketua Program Studi
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan**




Dr. Ir. Alfa Filep Petrus Nelwan, M.Si
NIP. 19660115 1995031 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Rahmat Ashari
NIM : L051171510
Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan bahwa skripsi dengan Judul: "Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pokok dan Fungsional Untuk Peningkatan Produksi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lantora" ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendiknas No. 17, tahun 2007).

Makassar, 1 Februari 2023



Andi Rahmat Ashari

Nim: L01171510

PERNYATAAN AUTHORSHIP

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Rahmat Ashari
NIM : L051171510
Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan bahwa publikasi sebagian atau keseluruhan isi Skripsi pada jurnal atau forum ilmiah lain harus seizin dan menyertakan tim pembimbing sebagai pemilik tulisan (*author*) dan Universitas Hasanuddin sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya dua semester (satu tahun sejak pengesahan skripsi) saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan skripsi ini, maka pembimbing sebagai salah seorang dari penulis berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang ditentukan kemudian, sepanjang nama mahasiswa tetap diikutsertakan.

Makassar, 1 Februari 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Ir. Alfa F.P. Nelwan, M.Si

NIP. 19660115199503 1 002

Penulis



Andi Rahmat Ashari

NIM. L051171510

ABSTRAK

ANDI RAHMAT ASHARI L01171510. “Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pokok dan Fungsional Untuk Peningkatan Produksi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lantora Kab. Polewali Mandar”. Dibimbing oleh **St. Aisjah Farhum** sebagai pembimbing utama dan **Ilham Jaya** sebagai pembimbing anggota.

Kondisi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lantora kurang baik karena ada beberapa fasilitas seperti gedung PPI yang belum memiliki aktivitas lelang dan penjualan ikan, kolam pelabuhan masih mengalami pendangkalan, dan fasilitas pada kantor pengelola PPI Lantora belum memadai karena belum memiliki computer sehingga dalam pelayanan SPB nelayan masih menggunakan *form* manual. Melihat kondisi tersebut, maka dirasa perlu untuk diadakan penelitian mengenai studi tingkat pemanfaatan fasilitas pokok dan fungsional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lantora di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi fasilitas pokok dan fungsional yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan Lantora, dan menganalisis tingkat pemanfaatan fasilitas pokok dan fungsional yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan Lantora. Metode Penelitian ini adalah metode studi kasus dengan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Analisa data yang di gunakan menggunakan analisis *numeric*. Hasil penelitian menunjukkan fasilitas pokok yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan Lantora yaitu dermaga, kolam pelabuhan, daratan pelabuhan, pemecah gelombang sedangkan untuk fasilitas fungsional yaitu tempat pelelangan ikan, pabrik es, coolstorage, solar paket diler nelayan, air bersih, gedung listrik, kantor pengelolah pangkalan pendaratan ikan. Tingkata pemanfatatan Pangkalan Pendaratan Ikan lantora seperti dermaga 8,87%, kolam pelabuhan 77,69%, kedalam perairan 88,33%, daratan pelabuhan lebih dari 100%, solar paket diler nelayan 63.36%, air bersih 58,4%, gedung pelelangan 0,11%, pabrik es 1,98%. Pada tingkat pemanfaatan fasilitas pokok dan fungsional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lantora masih tergolong sangat rendah seperti dermaga, gedung pelelangan, dan pabrik es, karena kurangnya neleyan yang membongkar hasil tangkapannya serta kurangnya kapal yang bersandar di dermaga PPI Lantora.

Kata Kunci: PPI Lantoran, Fasilitas Pokok dan Fungsional, Tingkat Pemanfaatan Fasilitas.

ABSTRACT

ANDI RAHMAT ASHARI L01171510. "Level of Utilization of Basic and Functional Facilities to Increase Production at the Fish Landing Base (PPI) Lantora Kab. Polewali Mandar. Supervised by St. Aisjah Farhum as the main supervisor and Ilham Jaya as the member's advisor..

The condition of the Lantora Fish Landing Base (PPI) is not good because there are several facilities such as the PPI building which does not yet have auction and fish sales activities, the port pool is still experiencing siltation, and the facilities at the PPI Lantora management office are inadequate because they do not yet have a computer so that fishermen can serve SPB still using the manual form. Seeing these conditions, it is deemed necessary to conduct research on the study of the level of utilization of the main and functional facilities of the Lantora Fish Landing Base (PPI) in Polewali District, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi. The purpose of this study was to identify the main and functional facilities at the Lantora Fish Landing Base, and to analyze the level of utilization of the main and functional facilities at the Lantora Fish Landing Base. This research method is a case study method with data collected in the form of primary data and secondary data. Analysis of the data used using numerical analysis. The results showed that the main facilities at the Lantora Fish Landing Base were docks, harbor ponds, harbor land, breakwaters while for functional facilities, namely fish auctions, ice factories, cool storage, solar packages, fisherman dealers, clean water, electricity buildings, management offices. fish landing base. The level of utilization of the Lantora Fish Landing Base such as the pier is 8.87%, the harbor pool is 77.69%, the depth to the water is 88.33%, the harbor land is more than 100%, the solar package for fisherman dealers is 63.36%, clean water is 58.4%, the auction building 0.11%, ice factory 1.98%. At the level of utilization of the basic and functional facilities of the Lantora Fish Landing Base (FLB) it is still classified as very low such as wharves, auction buildings and ice factories, due to the lack of fishermen unloading their catches and the lack of ships docking at the Lantora FLB docks.

Keywords: Lantoran FLB, Principal and Functional Facilities, Facility Utilization Level.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis dengan tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai dengan September 2022 ini ialah pelabuhan perikanan, dengan judul “Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pokok dan Fungsional Untuk Peningkatan Produksi di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lantora Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat”. Dengan kerendahan hati dan segala hormat penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dengan mendukung dan membimbing Penulis, khususnya kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan Tesis ini.
2. Kedua orang tua tercinta **Asriful** dan **Andi Harni** yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Ibu **Dr. Ir. St. Aisjah Farhum, M.Si** selaku pembimbing utama dan Bapak **Ir Ilham Jaya. M.M** selaku pembimbing anggota yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing dan memberikan petunjuk dari awal penelitian hingga selesainya penulisan tesis ini.
4. Bapak **Dr. Ir. Alfa F.P. Nelwan. M.Si** dan bapak **Dr. Ir. Mahfud Palo. M.Si** selaku dosen penguji yang telah memberikan ilmu, masukan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan tesis.
5. Ibu **Dr. Ir. Siti Aslamyah, MP** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan
6. Bapak **Dr. Ir. Alfa F.P. Nelwan. M.Si** selaku Ketua Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
7. Kak **Baso Aswar S.Pi M.Si** yang telah membantu memberikan saran serta semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. **Seluruh Dosen Pengajar** dan **Staf** Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin yang bekerja keras dalam memberikan ilmu dan membantu menyelesaikan segala bentuk persuratan berkas-berkas penulis butuhkan.
9. Ibu **Safarni S.Pi** selaku staf Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh pengelola PPI Lantora yang sangat berjasa membantu penulis mulai dari persiapan hingga selesainya kegiatan penelitian ini.

10. Teman – teman seperjuangan mahasiswa S1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan angkatan 2017, kerabat, keluarga, dan semua pihak yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberi nilai untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta segala amal baik serta jasa dari pihak yang membantu Penulis mendapat berkat dan karunia Allah SWT. Aamiin.

Makassar, 1 Februari 2023

Andi Rahmat Ashari

BIODATA PENULIS



Andi Rahmat Ashari dilahirkan pada tanggal 01 Januari 1999 di Bulukumba dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan bapak Asriful dan ibu Andi Harni. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 217 pada tahun 2011, MTs Negeri 1 Bulukumba pada tahun 2014, dan SMA Negeri 1 Bontotiro tahun 2014. Pada tahun 2017 penulis berhasil diterima di Universitas Hasanuddin melalui Jalur Non Subsidi (JNS). Penulis terdaftar pada Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Selama menjalani perkuliahan peneliti juga terdaftar sebagai anggota KMP PSP FIKP UNHAS dan anggota KEMAPI FIKP UNHAS. Penulis pernah menjabat sebagai Badan Pengurus Harian Divisi Kesekretariatan KMP PSP FIKP UNHAS.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Pelabuhan Perikanan	4
B. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan.....	5
C. Pangkalan Pendaratan Ikan.....	7
D. Peran dan Fungsi Pelabuhan Perikanan.....	9
E. Operasional Pelabuhan Perikanan	10
F. Fasilitas Pelabuhan Perikanan	11
G. Tingkat Pemanfaatan Pangkalan Pendaratan Ikan	14
III. METODE PENELITIAN	17
A. Waktu dan Tempat	17
B. Alat dan Bahan	17
C. Metode penelitian	18
D. Analisis Data.....	18
IV. HASIL	22
A. Keadaan Umum PPI Lantora	22
B. Fasilitas Sarana dan Prasarana PPI Lantora	23
C. Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Lantora ...	32
V. PEMBAHASAN	35
A. Keadaan Umum PPI Lantora Kabupaten Polewali Mandar	35
B. Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lantora	36
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Tingkat pemanfaatan fasilitas Pokok beberapa PPI di Indonesia.....	16
2. Tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional beberapa PPI di Indonesia	16
3. Alat dan Bahan serta kegunaannya	17
4. Penilaian Tingkat Pemanfaatan	21
5. Fasilitas Pokok Pangkalan Pendaratan Ikan Lantora.....	23
6. Fasilitas Fungsional PPI Lantora	27
7. Analisis Perhitungan Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pokok dan Fungsional....	32

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Peta lokasi penelitian.....	17
2. Layout PPI Lantora.....	22
3. Dermaga PPI Lantora.....	24
4. Kolam Pelabuhan PPI Lantora.....	24
5. Breakwater PPI Lantora.....	25
6. Daratan Pelabuhan PPI Lantora.....	26
7. Tempat Pelelangan Ikan Lantora.....	27
8. Pabrik Es PPI Lantora.....	28
9. Coldstorage PPI Lantora.....	29
10. Solar Pack Dealer-Nelayan (SPDN) PPI Lantora.....	29
11. Gedung Listrik PPI Lantora.....	31
12. Kantor Pengelolah PPI Lantora.....	31

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1.	Analisis Perhitungan Tingkat Pemanfaatan Dermaga	46
2.	Analisis Perhitungan Tingkat Pemanfaatan Kolam Pelabuhan.....	46
3.	Analisis Perhitungan Tingkat Pemanfaatan Kedalaman Perairan	47
4.	Analisis Perhitungan Tingkat Pemanfaatan Daratan Pelabuhan	48
5.	Analisis Perhitungan Tingkat Pemanfaatan Gedung Pelelangan	48
6.	Analisis perhitungan Tingkat pemanfaatan BBM Solar Paket Diesel Nelayan.	49
7.	Analisis perhitungan Tingkat Pemanfaatan Pabrik Es.....	49
8.	Analisis Perhitungan Tingkat Pemanfaatan Air Bersih	50
9.	Wawancara dengan nelayan	52

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Polewali Mandar terletak di Sulawesi Barat dengan luas wilayah sebesar 2.022,30 km². Secara administratif, Kabupaten Polewali Mandar terbagi ke dalam 16 kecamatan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Tubbi Taramanu dengan luas 356,95 km² atau 17,65 persen dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas 21,34 km² atau 1,06 persen. Kecamatan Matangnga merupakan kecamatan terjauh yang berjarak 70,3 km antara pusat kecamatan dari ibukota kabupaten. Kabupaten Polewali Mandar terletak ± 195 km sebelah selatan Mamuju, Ibukota Provinsi Sulawesi Barat atau ± 250 km sebelah utara Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Polewali Mandar terletak pada posisi 3.4.7,83" LS - 3*32-3,79" LS dan 118*53-57,55" BT - 119*29*33,31"BT.

Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk muat barang, kran - kran untuk bongkar muat barang, gudang laut (transito) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang di mana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman kedaerah tujuan atau pengapalan. Terminal ini dilengkapi dengan jalan-jalan kereta api, jalan raya atau saluran pelayaran darat. Dengan demikian daerah pengaruh pelabuhan biasa sangat jauh dari pelabuhan tersebut (Triatmodjo, 1996).

Untuk memajukan kegiatan penangkapan ikan ditengah laut supaya hasilnya tetap memuaskan tanpa mengabaikan segi keselamatan, maka diperlukan prasarana di daratan berupa pangkalan pendaratan ikan (PPI). Pada tahap ini PPI tersebut hanya berupa dermaga, kemudian ada yang berkembang perlengkapannya dengan tempat untuk menjual dan mengolah ikan, dan sejak awal pelita II pemerintah memberikan anggaran pembangunannya guna lebih melengkapi fasilitas-fasilitas berbagai PPI antara lain berupa pemecah gelombang, gedung pelelangan, kantor, jalan, kompleks, air bersih, pembangkit listrik dan lain-lain (Suprabowo, 2000).

Menurut Lubis (2012), secara umum permasalahan yang dihadapi oleh pelabuhan-pelabuhan perikanan di Indonesia sangat kompleks, mulai dari terbatasnya fasilitas yang ada, lemahnya pengelolaan, hingga kurang kompetennya sumberdaya manusia pengelola pelabuhan. Hal ini ternyata berimbas pada pendapatan pengguna jasa pelabuhan perikanan, terutama nelayan selaku pelaku utama usaha perikanan tangkap. Keterbatasan kapasitas fasilitas akan berpengaruh terhadap kelancaran

aktivitas kepelabuhanan sehingga fungsinya tidak tercapai secara optimal. Hal tersebut pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perkembangan perikanan tangkapnya.

Sebelum peneliti melakukan penelitian tentang Tingkat pemanfaatan fasilitas utama dan fungsional PPI Lantora, telah ada beberapa hasil penelitian terdahulu, seperti Tingkat pemanfaatan fasilitas dasar dan fungsional Pangkalan Pendaratan Ikan Tanjungsari antara lain Tingkat Pemanfaatan Lahan sebesar 87%, tingkat pemanfaatan alur pelayaran sebesar 89 %, tingkat pemanfaatan dermaga sebesar 90 % dan tingkat pemanfaatan gedung pelelangan sebesar 83 %. (Ardandi *et al*, 2013). Serta Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kronjo memiliki fasilitas antara lain: fasilitas pokok yang terdiri dari dermaga, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jalanan kompleks, fasilitas fungsional terdiri dari gedung TPI, bengkel, instalasi air bersih, instalasi listrik, SPDN, depot es, tempat pengolahan dan docking, dan fasilitas penunjang terdiri dari, BPN (Balai Pertemuan Nelayan), kantor pelabuhan, MCK, masjid, tempat parkir, kios-kios dan pembuangan limbah air. Fasilitas yang masih bisa dipergunakan dan tingkat pemanfaatannya belum mencapai batas optimal adalah dermaga, gedung TPI, kolam pelabuhan, SPDN, dan lahan parkir. Kedalaman kolam pelabuhan, kebutuhan air bersih, kebutuhan es balok, dan lahan pelabuhan perikanan PPI Kronjo telah melampaui kapasitasnya dengan tingkat pemanfaatan fasilitas masing-masing 223,33%, 2.111,09%, 702%, 200%-400% (Pujiastuti D *et al*, 2018).

Potensi kelautan Kabupaten Polewali Mandar tersebar di 8 kecamatan dan 27 Desa/Kelurahan dengan panjang garis pantai 89,07 km yang membentang dari Desa Paku Kecamatan Binuang hingga Desa Tandung Kecamatan Tinambung yang di dalamnya terdapat 7 buah pulau. Kabupaten Polewali Mandar juga memiliki beberapa komoditi tangkap unggulan. Menurut hasil survei, pada saat ini kondisi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lantora kurang baik karena ada beberapa fasilitas seperti gedung PPI yang belum memiliki aktivitas lelang dan penjualan ikan, kolam pelabuhan masih mengalami pendangkalan, dan fasilitas pada kantor pengelola PPI Lantora belum memadai karena belum memiliki computer sehingga dalam pelayanan SPB nelayan masih menggunakan *form* manual.

Peranan pelabuhan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap produk perikanan bermutu tinggi, juga peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan dan peningkatan pendapatan daerah, sehingga dianggap perlu melakukan penelitian tentang tingkat pemanfaatan fasilitas utama dan fungsional untuk peningkatan produksi. Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dalam pembangunan khususnya pengembangan pelabuhan.

Melihat kondisi tersebut, maka dirasa perlu untuk diadakan penelitian mengenai

studi tingkat pemanfaatan fasilitas pokok dan fungsional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lantora di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat agar fasilitas-fasilitas khususnya fasilitas pokok dan fungsional di PPI Lantora dapat difungsikan secara optimal untuk menunjang perkembangan sektor perikanan di Kabupaten Polewali Mandar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa saja fasilitas pokok dan fungsional yang ada di PPI Lantora Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana tingkat pemanfaatan fasilitas pokok dan fungsional yang ada di PPI Lantora Kabupaten Polewali Mandar?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Mengidentifikasi fasilitas pokok dan fungsional yang ada di PPI Lantora.
- b. Menganalisis tingkat pemanfaatan fasilitas pokok dan fungsional yang ada di PPI Lantora.

2. Kegunaan

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dalam pembangunan khususnya pengembangan pelabuhan. Selain itu sebagai informasi ilmiah tentang pelabuhan perikanan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan dalam bahasa mempunyai dua pengertian yaitu *harbour* dan *port*. Harbour adalah suatu tempat dipinggir laut yang dapat digunakan untuk berlabuh dengan aman bagi kapal-kapal, karena kapal-kapal terlindung dari angin laut. Port adalah suatu tempat untuk membongkar dan memuat barang atau penumpang dari kapal-kapal yang datang dan dikenal sebagai kegiatan maritim dan di kelolah oleh otoritas pemerintah. Sedangkan pelabuhan perikanan adalah pelabuhan yang secara khusus menampung kegiatan masyarakat perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun pemasaran (Murdianto, 2004).

Menurut Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 1, Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan perikanan adalah suatu wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan lautan yang digunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas sejak ikan didaratkan sampai ikan didistribusikan (Lubis, 2012).

Secara teknis pelabuhan perikanan adalah salah satu bagian ilmu bangunan maritim, dimana dimungkinkan kapal-kapal berlabuh atau bersandar kemudian dilakukan bongkar muat (Kramadibrata, 2002). Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pelabuhan perikanan merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan ditinjau dari pengolahan dan pemasaran, baik berskala lokal, nasional maupun berskala internasional. Menurut Kementrian Kealautan dan Perikanan (1991) dalam Kurniawan (2001) bahwa aspek-aspek tersebut secara terperinci adalah:

1. Produksi: bahwa pelabuhan perikanan sebagai tempat para nelayan untuk melakukan kegiatan-kegiatan produksinya, mulai dari memenuhi kebutuhan.
2. Perbekalan untuk menangkap ikan di laut sampai membongkar hasil tangkapannya.
3. Pengolahan: bahwa pelabuhan perikanan menyediakan sarana-sarana yang dibutuhkan untuk mengolah hasil tangkapannya.
4. Pemasaran: bahwa pelabuhan perikanan merupakan pusat pengumpulan dan pemasaran hasil tangkapannya.

B. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

Berdasarkan Kep No. 31 Tahun 2012 tentang Pelabuhan perikanan, maka pelabuhan perikanan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pelabuhan perikanan nusantara (PPN/Tipe A)
- b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN/Tipe B)
- c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP/Tipe C)
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI/Tipe D).

Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Surat Keputusan Nomor Kep.8/MEN/2012 tentang pelabuhan perikanan membagi pelabuhan perikanan menjadi (pasal 6) :

- a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS).

Pelabuhan Perikanan Samudera merupakan pelabuhan perikanan tipe A, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan wilayah perairan internasional.

- b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN).

Pelabuhan Perikanan Nusantara masuk kategori tipe B, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).

- c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).

Pelabuhan Perikanan Pantai masuk kategori tipe C, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah pantai dan laut teritorial, dan bisa sampai ke wilayah laut ZEEI.

- d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Pangkalan Pendaratan Ikan masuk kategori tipe D, yang skala layanannya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman, perairan pantai dan perairan teritorial.

Menurut Murdiyanto (2004), klasifikasi besar-kecil usahanya pelabuhan perikanan dibedakan menjadi 4 tipe pelabuhan, yaitu:

1. Pelabuhan Perikanan Tipe A (Pelabuhan Perikanan Samudera)

Pelabuhan perikanan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan samudera yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan perairan internasional, mempunyai perlengkapan untuk menangani (handling) dan mengolah sumber daya ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang didaratkan. Adapun jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 200 ton/hari atau 73.000 ton/tahun baik untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri (ekspor). Pelabuhan perikanan tipe A

kapal ini dirancang untuk bisa menampung kapal berukuran lebih besar daripada 60 GT (gross tonage) sebanyak sampai dengan 100 unit kapal sekaligus. Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 30 Ha (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN / 2012).

2. Pelabuhan Perikanan tipe B (Pelabuhan Perikanan Nusantara)

Pelabuhan perikanan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan nusantara yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), mempunyai perlengkapan untuk menangani (handling) dan mengolah sumber daya ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang didaratkan. Adapun jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 50 ton/hari atau 18.250 ton/tahun baik untuk 9 pemasaran di dalam negeri. Pelabuhan perikanan tipe B ini dirancang untuk bisa menampung kapal berukuran lebih besar dari pada 60 GT sebanyak sampai dengan 50 unit kapal sekaligus. Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 10 Ha. (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN / 2012).

3. Pelabuhan Perikanan Tipe C (Pelabuhan Perikanan Pantai)

Pelabuhan perikanan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang dapat menampung kapal-kapal nelayan yang berukuran 15 GT sebanyak 25 unit sekaligus, dengan produksi ikan sebanyak 20 ton/hari dan mempunyai perlengkapan untuk mengolah hasil tangkapan. Untuk pembangunan PPP di rencanakan cadangan lahan pengembangan seluas 5 Ha (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN / 2012).

4. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dimaksudkan sebagai sarana dan prasarana pendaratan ikan yang dapat menangani produksi ikan sampai dengan 5 ton/hari, dapat menampung kapal perikanan sampai dengan ukuran 5 GT sejumlah 15 unit sekaligus. Untuk pembangunan PPI ini diberikan lahan darat untuk pengembangan seluas 1 Ha (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN / 2012).

Pengklasifikasian pelabuhan perikanan pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai parameter (Lubis, 2012), antara lain:

- a. Luas lahan, letak, dan jenis konstruksi bangunanya
- b. Tipe dan ukuran kapal-kapal yang masuk pelabuhan.
- c. jenis perikanan dan skala usahanya.
- d. Distribusi dan tujuan ikan hasil tangkapan.

C. Pangkalan Pendaratan Ikan

Pangkalan Pendaratan Ikan yang merupakan pelabuhan perikanan pantai memiliki kriteria sebagai berikut;

1. Melayani kapal perikanan di wilayah perairan pedalaman dan perairan kepulauan.
2. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang- kurang 10 GT.
3. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya 2 m.
4. Mampu menampung sekurang-kurangnya 20 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT kapal perikanan sekaligus.
5. Memiliki lahan sekurang-kurangnya seluas 2 Ha.

Sepertinya halnya pelabuhan secara umum, maka pelabuhan perikanan juga dapat diklasifikasikan yaitu menurut letak dan jenis usaha perikananannya. Menurut Lubis (2002), pelabuhan perikanan bisa dilihat dari banyaknya faktor yang ada, pengklasifikasiannya dapat dipengaruhi oleh berbagai parameter, antara lain;

- a. Luas lahan, letak dan jenis konstruksi bangunannya.
- b. Tipe dan ukuran kapal-kapal yang masuk pelabuhan.
- c. Jenis perikanan dan skala usaha.
- d. Distribusi dan tujuan ikan hasil tangkapan.

Pelabuhan perikanan menurut letak dan tipe konstruksi bangunan, dibagi menjadi (Lubis, 2012), antara lain:

- a. Pelabuhan alam, adalah suatu daerah yang menjorok ke dalam, terlindung oleh suatu pulau, jazirah atau terletak di suatu teluk sehingga kapal dapat bernavigasi dan berlabuh.
- b. Pelabuhan buatan, adalah suatu daerah perairan hasil bentukan manusia agar terlindung dari ombak/badai/ arus, sehingga memungkinkan kapal untuk merapat.
- c. Pelabuhan semi alam, adalah pelabuhan yang sifatnya juga pelabuhan alam atau pelabuhan buatan.

Pelabuhan Perikanan berdasarkan jenis dan skala usaha perikananannya, dibedakan menjadi;

- a. Pelabuhan perikanan berskala besar atau pelabuhan perikanan laut dalam, yaitu pelabuhan untuk perikanan industri atau untuk berlabuh/bersandarnya kapal-kapal penangkapan berukuran besar dengan ukuran panjang antara 40 sampai 120 meter, berat > 50 GT. Mempunyai kolam pelabuhan yang dalam dan dermaga yang panjang. Di pelabuhan ini terdapat juga perusahaan- perusahaan pengolahan dan perdagangan-perdagangan besar. Hasil tangkapan yang didaratkan didistribusikan

untuk tujuan nasional maupun internasional.

- b. Pelabuhan perikanan berskala menengah, yaitu pelabuhan untuk perikanan semi industri, dan merupakan tempat berlabuh dan bertambatnya kapal-kapal penangkapan ikan berukuran antara 15 sampai 50 GT. Di pelabuhan ini terkadang terdapat juga perusahaan-perusahaan pengolahan, sementara hasil tangkapannya bertujuan untuk konsumsi nasional dan sedikit untuk konsumsi lokal.
- c. Pelabuhan perikanan berskala kecil atau pelabuhan pantai, yaitu pelabuhan untuk perikanan kecil atau perikanan tradisional atau tempat berlabuh dan bertambatnya kapal-kapal penangkapan berukuran < 15 GT. Pelabuhan ini mempunyai kolam pelabuhan yang tidak terlalu dalam. Umumnya hasil tangkapan yang didaratkan adalah dalam bentuk segar atau dipertahankan kesegarannya dengan menambahkan es. Hasil tangkapan ditujukan terutama untuk pemasaran lokal.

Pelabuhan perikanan berdasarkan daerah operasi penangkapan, dibedakan menjadi:

- a. Pelabuhan perikanan laut lepas, yaitu pelabuhan tempat berlabuh atau bersandarnya kapal-kapal ikan yang melakukan penangkapan di laut lepas atau di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
- b. Pelabuhan perikanan lepas pantai, yaitu pelabuhan tempat berlabuh atau bersandarnya kapal-kapal ikan yang melakukan penangkapan di perairan lepas pantai atau di perairan nusantara.
- c. Pelabuhan perikanan pantai, yaitu pelabuhan tempat berlabuh atau bersandarnya kapal-kapal ikan yang melakukan penangkapan di perairan pantai.

Pelabuhan perikanan berdasarkan asal dan tujuan hasil tangkapan, dibedakan menjadi:

- a. Pelabuhan laut, yaitu pelabuhan yang terbuka untuk jenis perdagangan dalam dan luar negeri.
- b. Pelabuhan pantai, yaitu pelabuhan yang terbuka untuk jenis perdagangan dalam negeri.
- c. Pelabuhan sungai, yaitu pelabuhan yang cenderung untuk perdagangan antar daerah yang dihubungkan oleh sungai.

Pengklasifikasian pelabuhan perikanan seperti tersebut di atas pada dasarnya untuk mempermudah pengelolaan khususnya dan pengembangan pelabuhan pada umumnya.

Pangkalan Pendaratan Ikan Lantora yang terletak di Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat, dibangun pada tahun 2005 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pusat pengembangan masyarakat nelayan dan pertumbuhan ekonomi nelayan.

1. Tempat berlabuhnya kapal-kapal perikanan dan kegiatan-kegiatannya.
2. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan para nelayan.
3. Pusat penanganan dan pengelolaan hasil perikanan.
4. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan.
5. Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan.
6. Pusat penyuluhan dan pengumpulan data pusat pengawasan penangkapan ikan dan pengendalian sumberdaya ikan.

D. Peran dan Fungsi Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi yang bersifat umum (*general function*). Beberapa fungsi umum merupakan tugas pokok melindungi kapal dan pelayaran lainnya yang hanya dapat dilakukan di setiap pelabuhan perikanan yang bukan untuk kegiatan perikanan. Fungsi khusus merupakan tugas pelayaran di pelabuhan perikanan membedakan pelabuhan perikanan dari pelabuhan lain yang bukan pelabuhan perikanan. Fungsi khusus ini terutama yang diturunkan dari karakteristik komoditas perikanan yang sifatnya mudah busuk (*highly perishable*). Sifat mudah busuk ini menghendaki pelayanan khusus berupa perlakuan penanganan, pendistribusian hasil ikan secara cepat ataupun pengolahan (*fish processing*). Pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan darat dalam suatu sistem usaha dan berdayaguna tinggi (Murdianto, 2004).

Menurut Lubis (2012), Pelabuhan perikanan memiliki fungsi dan peranan terhadap perikanan laut, karena pelabuhan perikanan merupakan pusat perekonomian, mulai ketika ikan selesai ditangkap dari *fishing ground*-nya sampai ikan dipasarkan lebih lanjut. Hal tersebut mendorong keberadaan industri perikanan di pelabuhan perikanan, tidak hanya berskala lokal tetapi juga regional dan internasional. Fungsi utama pelabuhan perikanan berkaitan dengan pelayanan jasa-jasa bagi:

- a. Kapal-kapal yang telah selesai menangkap ikan dari daerah penangkapan antara lain adanya fasilitas pendaratan ikan yang aman dan pemeliharaan kapal.
- b. Hasil tangkapan yang telah didaratkan di pelabuhan perikanan antara lain adanya kegiatan pembongkaran, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan.
- c. Pengembangan industri perikanan yang berada dilingkungan pelabuhan perikanan.

Menurut Murdiyanto (2004), pelabuhan perikanan merupakan basis utama kegiatan industri perikanan tangkap yang harus dapat menjamin suksesnya aktivitas usaha perikanan tangkap di laut. Pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha yang berdaya guna tinggi. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per. 16/Men/2006, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi mendukung kegiatan yang

berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran.

Berdasarkan pasal 41 ayat 1 UU No.45/2009 tentang Perikanan, bahwa pelabuhan perikanan berfungsi sebagai:

- a. Tempat tambat labuh kapal perikanan.
- b. Tempat pendaratan ikan.
- c. Tempat pemasaran dan distribusi ikan.
- d. Tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan
- e. Tempat pengumpulan data tangkapan
- f. Tempat penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan
- g. Tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan.

Selanjutnya menurut Kusyanto (2005), untuk menjamin harga ikan dapat menguntungkan nelayan kewajiban Pemerintah membantu nelayan dalam memasarkan ikan melalui sistem lelang. Maksud dari sistem lelang adalah membantu nelayan menjual ikan untuk mendapatkan harga yang optimal pada suatu tempat tertentu kepada sejumlah pembeli melalui cara lelang. Dilain pihak fungsi pembinaan mutu dan pengolahan dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah produk perikanan sehingga akan menimbulkan dampak ganda baik terhadap pendapatan maupun penyerapan tenaga kerja.

Menurut Lubis (2012), peran pelabuhan perikanan yang dapat memberikan jasa-jasanya meliputi:

- a. Penanganan untuk mempertahankan mutu dan memberikan nilai tambah terhadap hasil tangkapan yang didaratkan.
- b. Mampu melakukan pembongkaran ikan secara cepat dan penyeleksian secara cermat.
- c. Mampu memasarkan ikan yang menguntungkan baik bagi nelayan maupun pedagang melalui aktivitas pelelangan.
- d. Mampu melakukan pendataan produksi hasil tangkapan yang didaratkan melalui sistem pendataan yang benar.

E. Operasional Pelabuhan Perikanan

Pengertian tentang operasional pelabuhan perikanan adalah tindakan atau gerakan sebagai pelaksana rencana yang telah dikembangkan untuk memanfaatkan fasilitas pada pelabuhan perikanan agar berdaya guna secara optimal bagi "fasilitas itu sendiri" atau fasilitas lainnya yang terkait" (Murdiyanto, 2004). Kegiatan operasional yang berlangsung di pelabuhan perikanan (Ngamel, 2005) adalah:

a. Pendaratan Ikan

Pendaratan ikan di pelabuhan perikanan sebagian besar berasal dari kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan itu, hanya kepelabuhan itu dengan menggunakan sarana transportasi darat.

b. Penanganan, Pengolahan dan Pemasaran ikan

Sesuai dengan salah satu fungsinya sebagai tempat pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan, penanganan ikan segar dilakukan dengan metode pendinginan yang dapat dilakukan dengan es. Pengolahan ikan yang dimaksudkan untuk mempertahankan mutu sehingga waktu pemasaran menjadi lebih lama serta dapat meningkatkan nilai jual ikan, kegiatan pemasaran yang dilakukan di pelabuhan bersifat lokal, nasional, maupun ekspor.

c. Penyaluran Perbekalan

Penjualan/pengisian perbekalan yang berkaitan dengan fasilitas pelabuhan saat ini adalah penjualan es, air bersih, penyaluran BBM dan suku cadang. Pelayanan perbekalan ini umumnya diadakan oleh pihak UPT pelabuhan, KUD, koperasi pegawai pelabuhan, BUMN dan pihak swasta.

Keberhasilan suatu kegiatan operasional pelabuhan perikanan tergantung pada kelancaran aktivitasnya mulai dari proses pendaratan hasil tangkapan, pelelangan, pengolahan hingga pemasaran hasil tangkapan (Afandy, 1998).

F. Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Fasilitas pelabuhan perikanan meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas tambahan. Luas dan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh suatu pelabuhan perikanan sangat tergantung kepada areal yang tersedia.

1. Fasilitas Pokok.

Fasilitas pokok adalah fasilitas dasar yang wajib dimiliki pelabuhan guna untuk melayani kegiatan pendaratan ikan seperti pembongkaran hasil tangkapan dan pemuatan perbekalan untuk keperluan operasi penangkapan ikan. Fasilitas pokok juga berfungsi melindungi kegiatan di pelabuhan dari gangguan alam seperti ombak, arus dan pendangkalan kolam pelabuhan akibat sedimentasi. Fasilitas pokok antara lain: dermaga, penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur masuk keluar kapal.

a. Dermaga

Dermaga adalah bangunan yang biasa digunakan untuk bersandar kapal di suatu pelabuhan. Dermaga dalam kegiatan perikanan digunakan untuk membongkar hasil tangkapan, berlabuh dan mengisi perbekalan. Ditinjau dari posisinya dermaga dapat digolongkan ke dalam dua tipe, yaitu : 1) *Wharf* atau *Quay*, yaitu bentuk dermaga yang

letaknya dekat atau sejajar dengan garis pantai, 2) *Pier* atau *Jetty*, yaitu dermaga yang bentuknya menjorok ke laut yang dapat berbentuk lurus, huruf T atau huruf L.

b. Kolam Pelabuhan dan Alur Pelayaran

Kolam pelabuhan adalah bagian perairan yang menampung kegiatan kapal perikanan antara lain : berlabuh, bongkar muat, mengisi perbekalan dan memutar kapal. Dalam pembuatan kolam pelabuhan hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- memiliki luas yang dapat menampung seluruh kapal yang berlabuh dan masih memberikan ruang yang leluasa untuk bergerak bagi kapal,
- lebarnya harus dapat dipergunakan bagi kapal yang berputar dengan bebas dalam gerak melingkar yang tidak terputus,
- perairannya cukup dalam sehingga kapal terbesar masih mampu untuk berlabuh di saat air sedang surut,
- tempatnya cukup terlindung dari angin, gelombang dan arus yang berbahaya.

Daerah memutar kapal (*turning basin*) di dalam kolam pelabuhan dapat mempunyai berbagai bentuk tergantung pada ukuran pelabuhan dan jumlah kapal yang akan berlabuh. Radius "*turning circle*" yang ideal adalah dua kali panjang kapal terbesar dan ukuran minimum radius adalah sama dengan panjang kapal terbesar. Untuk tetap amannya kapal melakukan pelayaran di dalam kolam pelabuhan maka kedalaman perairan harus cukup dalam untuk kapal terbesar dalam muatan penuh. Kedalaman perairan kolam pelabuhan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain : (1) draft kapal terbesar dengan muatan penuh yang menggunakan pelabuhan tersebut; (2) tinggi gelombang maksimum di dalam kolam pelabuhan ($H = 70$ cm); (3). Tinggi ayunan kapal yang berlayar (maksimum 30 cm); (4) "*Clearance*" sebagai pengaman antar lunas kapal (*keel*) dan dasar perairan. Nilai C berkisar 25 cm – 100 cm tergantung lunak atau kerasnya dasar perairan. Pada lokasi pendirian pelabuhan di mana kedalaman perairan tidak mencukupi, maka perlu dilakukan pengerukan.

Alur pelayaran, atau tempat masuk dan keluarnya kapal-kapal perikanan juga sangat penting keberadaannya. Alur pelayaran harus cukup lebar supaya kapal dapat berpapasan dengan aman, tetapi tidak boleh terlalu lebar karena akan mengakibatkan pengaruh gelombang ke dalam kolam pelabuhan akan menjadi besar.

c. Daratan pelabuhan.

Daratan pelabuhan adalah bagian darat yang menampung seluruh fasilitas pelabuhan, yang biasanya bagian darat ini dibatasi oleh air dan pagar pelabuhan. Luas daratan pelabuhan harus 2 – 4 kali luas seluruh fasilitas bilamana semuanya dibangun di atasnya.

Daratan pelabuhan harus berada pada ketinggian tertentu supaya tidak terendam air pada saat pasang tertinggi atau kena sapuan gelombang pada musim ombak.

Ketinggian pelabuhan juga berhubungan dengan sistim drainage pelabuhan. Tinggi daratan pelabuhan sekurang-kurangnya 50 cm di atas pasang tertinggi, sedangkan dermaga dan pinggiran lainnya 50 – 70 cm di atas pasang air laut tertinggi tergantung pada tinggi gelombang di kolam pelabuhan tersebut.

d. Pemecah gelombang

Pada daerah di mana gelombang lautnya sangat tinggi maka sangat diperlukan untuk membangun pemecah gelombang (*break water*) yang fungsinya untuk melindungi kegiatan yang berlangsung di kolam pelabuhan. *Break water* sekaligus dapat membentuk kolam pelabuhan. Pemecah gelombang juga dapat berfungsi sebagai penahan sedimen dari sekitar pelabuhan.

2. Fasilitas Fungsional

Fasilitas fungsional yang dikatakan juga suprastruktur adalah fasilitas yang berfungsi untuk meninggikan nilai guna dari fasilitas pokok sehingga dapat menunjang aktivitas pelabuhan perikanan. Fasilitas-fasilitas fungsional ini dikelompokkan antara lain untuk:

a. Penanganan hasil tangkapan dan pemasarannya, yaitu :

- Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- Fasilitas pemeliharaan dan pengolahan hasil tangkapan, seperti tempat penjemuran ikan dan gedung pengolahan;
- Pabrik es dan gudang es;
- Refrigerasi/fasilitas pendingin, seperti *cool room* dan *cold storage*; dan
- Gedung-gedung pemasaran.

b. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan armada dan alat penangkapan ikan, yaitu:

- Lapangan perbaikan alat penangkapan ikan;
- Ruang mesin;
- Tempat penjemuran alat penangkapan ikan;
- Bengkel : fasilitas untuk memperbaiki mesin kapal;
- *Slipways* : tempat untuk memperbaiki bagian lunas kapal;
- Gudang jaring : tempat untuk penyimpanan jaring; dan
- *Vessel lift* : fasilitas untuk mengangkat kapal dari kolam pelabuhan ke lapangan perbaikan kapal.

c. Fasilitas perbekalan : tangki dan instalasi air minum, tangki bahan bakar.

d. Fasilitas komunikasi : stasiun jaringan telepon, radio SSB

3. Fasilitas Penunjang

Fasilitas tambahan yaitu fasilitas yang secara tidak langsung dapat menaikkan peranan pelabuhan namun tidak dimasukkan ke dalam fasilitas fungsional. Fasilitas

tambahan dapat berupa penginapan nelayan, mess operator, tempat perbaikan alat tangkap, perkantoran pengusaha perikanan, kantin, poliklinik dan tempat beribadah. Pelabuhan perikanan memiliki fasilitas sebagai berikut:

1. Fasilitas luar (*contour facilities*) antara lain : pemecah gelombang, penahan pasir (*sand groins*), dinding penopang (*retaining walls*), pintu masuk (*sluices*), tempat tambat (*locks*), dermaga (*levees*), *jetties*, tanggul (*seashore levees*), dan pembatas/dinding (*parapets*).
2. Fasilitas berlabuh (*mooring facilities*) antara lain: tempat tambat dermaga (*mooring quay*), tempat pendaratan, pelampung tambat (*mooring buoy*), dermaga apung (*floating piers*), tonggak tambatan (*bollards*), dan *slipways*.
3. Fasilitas di air (*water facilities*) antara lain: jalan keluar, tempat berlabuh, dan kolam Pelabuhan.
4. Fasilitas perhubungan (*transporting facilities*) antara lain: jalan, jembatan, navigasi, dan sebagainya.
5. Fasilitas darat (*land for fishing port facilities*) antara lain:
 - fasilitas pemeliharaan kapal dan alat tangkap yang meliputi perbaikan alat tangkap, kapal dan mesin, tempat penjemuran alat tangkap.
 - fasilitas suplai meliputi: suplai air dan BBM untuk kapal.
 - fasilitas penyimpanan, penanganan dan pengolahan hasil tangkapan meliputi: tempat penjualan, pembekuan, pengeringan, pabrik es, dan lainnya,
 - fasilitas komunikasi dan stasium cuaca.
 - fasilitas untuk awak kapal meliputi: penginapan, kamar mandi, poliklinik dan ruang pertemuan.
 - fasilitas pengelolaan meliputi: kantor dan pos keamanan.

G. Tingkat Pemanfaatan Pangkalan Pendaratan Ikan

Dalam pelaksanaan pembangunan suatu pelabuhan perikanan, tentunya akan menimbulkan dampak lingkungan (positif maupun negatif), baik didarat, perairan, maupun udara. Dampak adalah suatu usaha atau kegiatan, secara langsung maupun tidak langsung. Dampak juga diartikan sebagai suatu bentuk antara dua kepentingan atau perubahan yang terjadi dalam suatu lingkungan sebagai akibat adanya aktivitas manusia (Lubis E, 2012)

Dampak ekonomi dari pembangunan pelabuhan pemanfaatan pelabuhan perikanan diantaranya adalah memberikan keuntungan bagi pihak pengelola maupun pemilik pelabuhan perikanan atau minimum pendapatan pelabuhan seimbang dengan biaya pengoperasiannya. pelabuhan perikanan dapat memberikan suatu nilai atau harga ikan yang layak pada nelayan dan pedagang karena adanya aktivitas pelelangan ikan,

sedangkan bagi pengelola, adanya fasilitas pengelola bermanfaat untuk menunjang aktivitasnya. selain itu, nelayan dan pedagang dari pada dibeli dari luar pelabuhan perikanan, juga memberikan nilai tambah terhadap hasil perikanan yang diolah dan dikemas dengan baik.

Tingkat pemanfaatan serta pelaksanaan fungsi pelabuhan berdasarkan literatur yang ada yakni (Lubis E, 2000) dibagi berdasarkan kelompok kepentingan yaitu fungsi maritim, fungsi komersial, dan fungsi jasa. berdasarkan pengamatan langsung fungsi maritim tidak terjadi disana di karenakan tidak ada kontak nelayan dengan pemilik kapal, dimana pemilik kapal yang secara langsung mengoperasikan kapalnya. sedangkan fungsi komersial terlaksana di PPI dengan baik, karena terjadi proses distribusi perikanan atau jual beli antara masyarakat dengan pedagang ikan melalui transaksi yang terjadi di TPI. Dan untuk fungsi jasa tidak terlaksana secara maksimal hal ini di karenakan tidak adanya jasa penanganan mutu ikan, sedangkan untuk jasa pendaratan ikan dan jasa kapal penangkapan ikan sudah terlaksana (Arsyad, 2012)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2004 tentang perikanan pasal 41, fungsi dan peranan pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat pengembangan dan pemasaran ikan hasil tangkapan. Setelah ikan hasil tangkapan tersebut ditangani dengan baik, maka ikan hasil tangkapan tersebut dapat dipasarkan atau didistribusi. Salah satu upaya pengoperasionalan pelabuhan perikanan adalah pengembangan pelabuhan perikanan sebagai pusat penanganan dan pemasaran ikan (*central marker*), ditempat inilah terjadi pertemuan dan transaksi antara produsen/nelayan dengan konsumen/pembeli Oleh karena itu, dalam suatu kompleks pelabuhan perikanan, fasilitas utama selain pembangunan laut juga dilengkapi dengan pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Untuk fungsi pokok pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat pengembangan perikanan di bidang produksi, pengelolaan dan pemasaran.

Menurut Merdekawati A (2019) tingkat pemanfaatan fasilitas-fasilitas pokok di PPI Lonrae yaitu tingkat pemanfaatan dermaga sebesar 108%, maka perlu diperpanjang karena kebutuhan dermaga saat ini 160,71 m. Tingkat pemanfaatan kolam pelabuhan sebesar 45,5%, maka belum perlu dilakukan pengembangan. Tingkat kebutuhan pada kedalaman perairan lebih dalam dari kedalaman perairan saat ini, maka perlu dilakukan penambahan, karena kebutuhan kedalaman perairan saat ini 3 m. Tingkat pemanfaatan daratan pelabuhan sebesar 26% maka belum perlu dilakukan pengembangan.

Menurut Arsyad (2012) tingkat pemanfaatan dan pelaksanaan fungsi pelabuhan pada beberapa fasilitas yang ada di PPI Bonehalang adalah tingkat pemanfaatan dermaga 71,84%, tingkat pemanfaatan kolam pelabuhan 54%, tingkat pemanfaatan kedalaman perairan 94,44%, tingkat pemanfaatan daratan pelabuhan 49,999%, tingkat

pemanfaatan gedung pelelangan 349%, tingkat pemanfaatan semua fasilitas di PPI Bonehalang 49%.

Tabel 1. Tingkat pemanfaatan fasilitas Pokok beberapa PPI di Indonesia

No	Pangkalan Pendaratan Ikan	Tingkat pemanfaatan				Kesesuaian Kedalaman	Referensi
		Dermaga	Kolam Pelabuhan	Daratan Pelabuhan	Break Water		
1.	Bonehalang selayar	150%	174%	2,4%	62%	Tidak sesuai	Arsyad, 2014
2.	Lonrae Bone	108%	45,5%	62%	-	Tidak sesuai	Merdekawati, 2019
3.	Tanjungsari pemalang	90%	89%	87%	-	Tidak sesuai	Ardandi, et al. 2013
4.	Ponjalae palopo	71,84%	54%	49,9%	-	Tidak sesuai	Pradana, 2014
5.	Lampung Banda Aceh	708%	2,48%	27%	411%	Tidak sesuai	Rahayu, 2016

Tabel 2. Tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional beberapa PPI di Indonesia

No.	Pangkalan Pendaratan Ikan	Tingkat pemanfaatan				Referensi
		BBM	Air Bersih	Pabrik Es	Gedung TPI	
1.	Riau	0,319%	4,53%	26,67%	-	Khairani, 2019
2.	Kronjo Tangerang	85,65%	2,111,09%%	702%	2,72%	Pujiastuti, et al. 2018
3.	Pulo Sarok, Aceh	-	-	-	1,91%	Tahir, 2018